



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 45) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 30 September
2022

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 30 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 78

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 58
TAHUN 2021 TENTANG STANDAR
HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN
2022

1. Ketentuan sub unit 1.5 Honorarium Tim/Panitia/Badan Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim/Panitia/Badan Pelaksana Kegiatan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim/panitia/badan pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Surat Keputusan Walikota.

Honorarium tim/panitia/badan pelaksana kegiatan diberikan kepada :

- a. Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pasuruan;
- b. ASN dan Non-ASN di luar Pemerintah Kota Pasuruan;
- c. ASN dan Non-ASN Pemerintah Kota Pasuruan yang mendapat tugas tambahan yang ditetapkan dalam keputusan walikota.

Ketentuan terkait pelaksanaan tugas yang dapat diberikan honorarium antara lain:

- a. Pembentukan tim/panitia/badan pelaksana kegiatan tersebut atas perintah peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya;

- b. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- c. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah.
- d. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- e. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- f. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Terhadap tim/panitia/badan pelaksana kegiatan dapat diberikan honorarium yang besarnya adalah sebagai berikut :

1.5.1 Yang ditetapkan oleh Walikota dengan mengikutsertakan instansi /Lembaga/Badan/Masyarakat di luar pemerintah Kota Pasuruan

- a. Pengarah sebesar Rp 1.500.000,00/OB
- b. Penanggung Jawab sebesar Rp 1.250.000,00/OB

- c. Ketua sebesar Rp 1.000.000,00/OB
- d. Wakil Ketua sebesar Rp 850.000,00/OB
- e. Sekretaris sebesar Rp 750.000,00/OB
- f. Anggota sebesar Rp 750.000,00/OB

1.5.2 Yang ditetapkan oleh Walikota dengan melibatkan antar satuan kerja perangkat daerah

- a. Pengarah sebesar Rp 750.000,00/OB
- b. Penanggung Jawab sebesar Rp 700.000,00/OB
- c. Ketua sebesar Rp 650.000,00/OB
- d. Wakil Ketua sebesar Rp 600.000,00/OB
- e. Sekretaris sebesar Rp 500.000,00/OB
- f. Anggota sebesar Rp 500.000,00/OB

Susunan keanggotaan tim/panitia/badan pelaksana kegiatan yang tidak diatur dalam ketentuan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan sub unit 1.36 Satuan Biaya Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan dan pengadaan barang/jasa diberikan kepada pegawai negeri sipil (PNS) dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan, dengan besaran honorarium sebagaimana tabel 1.36. berikut:

| NO. | URAIAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----|--------|--------|--------------|
|-----|--------|--------|--------------|

| NO. | URAIAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----|---|--------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku SKPKD : | | |
| | a. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar | OB | 2.200.000,00 |
| | b. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun | OB | 3.000.000,00 |
| | c. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun | OB | 3.800.000,00 |
| 2. | Honorarium Kuasa Bendahara Umum Daerah | | |
| | a. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar | OB | 1.400.000,00 |
| | b. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 trilyun | OB | 2.000.000,00 |
| | c. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 trilyun | OB | 2.200.000,00 |
| 3. | Honorarium Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) | | |
| | a. Nilai pagu dana s.d. Rp 30 juta | OB | 500.000,00 |
| | b. Nilai pagu dana Rp 30 juta s.d. Rp 100 juta | OB | 832.000,00 |
| | c. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta | OB | 1.000.000,00 |
| | d. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta | OB | 1.160.000,00 |
| | e. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar | OB | 1.328.000,00 |
| | f. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar | OB | 1.576.000,00 |
| | g. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar | OB | 1.824.000,00 |
| | h. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar | OB | 2.072.000,00 |
| | i. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar | OB | 2.408.000,00 |
| | j. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar | OB | 2.736.000,00 |
| | k. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar | OB | 3.072.000,00 |
| | l. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 | OB | 3.400.000,00 |

| NO. | URAIAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----|--|--------|-----------------|
| | miliar | | |
| | m. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar | OB | 3.816.000,00 |
| | n. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar | OB | 4.232.000,00 |
| | o. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar | OB | 4.648.000,00 |
| | p. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun | OB | 5.064.000,00 |
| | q. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun | OB | 5.896.000,00 |
| 4. | Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan kerja perangkat daerah (PPK SKPD) | | |
| | a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta | OB | 320.000,00 |
| | b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta | OB | 384.000,00 |
| | c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta | OB | 456.000,00 |
| | d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar | OB | 528.000,00 |
| | e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar | OB | 616.000,00 |
| | f. Nilai pagu dana di atas Rp2, 5 miliar s.d. Rp5 miliar | OB | 704.000,00 |
| | g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s. d. Rp10 miliar | OB | 792.000,00 |
| | h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar | OB | 1.000.000,00 |
| | i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar | OB | 1.216.000,00 |
| | j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar | OB | 1.424.000,00 |
| | k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp 100 miliar | OB | 1.632.000,00 |
| | l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar | OB | 1.952.000,00 |
| | m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar | OB | 2.264.000,00 |

| NO. | URAIAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----|---|--------|-----------------|
| | n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s. d. Rp750 miliar | OB | 2.584.000,00 |
| | o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun | OB | 2.896.000,00 |
| | p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun | OB | 3.536.000,00 |
| 5. | Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu (UPT. Puskesmas dan Kelurahan) | | |
| | a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta | OB | 150.000,00 |
| | b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | OB | 200.000,00 |
| | c. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | OB | 250.000,00 |
| | d. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar | OB | 300.000,00 |
| | e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar | OB | 350.000,00 |
| 6. | Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan | | |
| | a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta | OB | 272.000,00 |
| | b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta | OB | 336.000,00 |
| | c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta | OB | 400.000,00 |
| | d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar | OB | 456.000,00 |
| | e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2, 5 miliar | OB | 536.000,00 |
| | f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar | OB | 616.000,00 |
| | g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar | OB | 688.000,00 |
| | h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar | OB | 872.000,00 |
| | i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar | OB | 1.056.000,00 |
| | j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar | OB | 1.240.000,00 |

| NO. | URAIAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----|--|--------|-----------------|
| | k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar | OB | 1.424.000,00 |
| | l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar | OB | 1.696.000,00 |
| | m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar | OB | 1.976.000,00 |
| | n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar | OB | 2.248.000,00 |
| | o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun | OB | 2.528.000,00 |
| | p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun | OB | 3.072.000,00 |
| 7. | Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu | | |
| | a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta | OB | 208.000,00 |
| | b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta | OB | 248.000,00 |
| | c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta | OB | 296.000,00 |
| | d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar | OB | 344.000,00 |
| | e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2, 5 miliar | OB | 400.000,00 |
| | f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar | OB | 456.000,00 |
| | g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar | OB | 512.000,00 |
| | h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar | OB | 648.000,00 |
| | i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar | OB | 784.000,00 |
| | j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar | OB | 920.000,00 |
| | k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar | OB | 1.064.000,00 |
| | l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 | OB | 1.264.000,00 |

| NO. | URAIAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----|--|--------|-----------------|
| | miliar | | |
| | m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar | OB | 1.472.000,00 |
| | n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar | OB | 1.672.000,00 |
| | o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun | OB | 1.880.000,00 |
| | p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun | OB | 2.288.000,00 |
| 8. | Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa | OB | 680.000,00 |
| 9. | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta | OP | 544.000,00 |
| | b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp500 juta | OP | 680.000,00 |
| | c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d.Rp 1 miliar | OP | 816.000,00 |
| | d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2, 5 miliar | OP | 1.016.000,00 |
| | e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. 5 miliar | OP | 1.216.000,00 |
| | f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar | OP | 1.424.000,00 |
| | g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp 25 miliar | OP | 1.696.000,00 |
| | h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar | OP | 1.960.000,00 |
| | i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 | OP | 2.232.000,00 |

| NO. | URAIAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----|---|--------|-----------------|
| | miliar | | |
| | j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp100 miliar | OP | 2.504.000,00 |
| | k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp 250 miliar | OP | 2.864.000,00 |
| | l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar | OP | 3.224.000,00 |
| | m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar | OP | 3.592.000,00 |
| | n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun | OP | 3.952.000,00 |
| | o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun | OP | 4.448.000,00 |
| 10. | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi) | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta | OP | 608.000,00 |
| | b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp500 juta | OP | 608.000,00 |
| | c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp1 miliar | OP | 736.000,00 |
| | d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar | OP | 912.000,00 |
| | e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar | OP | 1.096.000,00 |
| | f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar | OP | 1.280.000,00 |
| | g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar | OP | 1.528.000,00 |
| | h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar | OP | 1.768.000,00 |
| | i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 | OP | 2.016.000,00 |

| NO. | URAIAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----|--|--------|-----------------|
| | miliar | | |
| | j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar | OP | 2.256.000,00 |
| | k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar | OP | 2.584.000,00 |
| | l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar | OP | 2.912.000,00 |
| | m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar | OP | 3.232.000,00 |
| | n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun | OP | 3.560.000,00 |
| | o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun | OP | 4.008.000,00 |
| 11. | Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan – Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi) | | |
| | a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp 50 juta | OP | 360.000,00 |
| | b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 50 juta s.d. Rp100 juta | OP | 360.000,00 |
| | c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta | OP | 360.000,00 |
| | d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | OP | 384.000,00 |
| | e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | OP | 480.000,00 |
| | f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar | OP | 576.000,00 |
| | g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar | OP | 728.000,00 |
| | h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di | OP | 872.000,00 |

| NO. | URAIAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----|---|--------|-----------------|
| | atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar | | |
| | i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar | OP | 1.016.000,00 |
| | j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar | OP | 1.208.000,00 |
| | k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar | OP | 1.400.000,00 |
| | l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar | OP | 1.592.000,00 |
| | m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar | OP | 1.784.000,00 |
| | n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 100 miliar s. d. Rp250 miliar | OP | 2.048.000,00 |
| | o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 250 miliar s.d. Rp500 miliar | OP | 2.304.000,00 |
| | p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 500 miliar s.d. Rp750 miliar | OP | 2.560.000,00 |
| | q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 750 miliar s.d. Rp1 triliun | OP | 2.816.000,00 |
| | r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas Rp1 triliun | OP | 3.168.000,00 |
| 12. | Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) | | |
| | a. Kepala | OB | 1.000.000,00 |
| | b. Sekretaris/Kasubbag. pada UKPBJ | OB | 750.000,00 |
| | c. Staf Pendukung | OB | 425.000,00 |

| NO. | URAIAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----|--|--------|-----------------|
| 13. | Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM)* | | |
| | d. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta | OB | 808.000,00 |
| | e. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta | OB | 968.000,00 |
| | f. Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta | OB | 1.128.000,00 |
| | g. Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar | OB | 1.288.000,00 |
| | h. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar | OB | 1.528.000,00 |
| | i. Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar | OB | 1.768.000,00 |
| | j. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar | OB | 2.016.000,00 |
| | k. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar | OB | 2.336.000,00 |
| | l. Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar | OB | 2.656.000,00 |
| | m. Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar | OB | 2.976.000,00 |
| | n. Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar | OB | 3.304.000,00 |
| | o. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar | OB | 3.704.000,00 |
| | p. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar | OB | 4.104.000,00 |
| | q. Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s. d. Rp 750 miliar | OB | 4.512.000,00 |
| | r. Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun | OB | 4.912.000,00 |
| | s. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun | OB | 5.712.000,00 |
| 14. | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | |
| | 14.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | |
| | a. Pembina | OB | 3.500.000,00 |
| | b. Pengarah | OB | 3.000.000,00 |
| | c. Ketua | OB | 2.500.000,00 |
| | d. Wakil Ketua | OB | 2.000.000,00 |
| | e. Sekretaris | OB | 1.500.000,00 |
| | f. Wakil Sekretaris | OB | 1.400.000,00 |

| NO. | URAIAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----|--|--------|-----------------|
| | g. Anggota | OB | 1.300.000,00 |
| | 14.2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | |
| | a. Ketua | OB | 1.000.000,00 |
| | b. Sekretaris | OB | 900.000,00 |
| | c. Anggota | OB | 600.000,00 |

Catatan :

(*) Dalam hal Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap jabatan sebagai PPKM maka diberikan salah satu honorarium yang terbesar antara honor PPKM dan honorarium Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai penanggungjawab pengelola keuangan.

3. Ketentuan sub unit 1.37 dihapus.
4. Ditambahkan 1 (satu) sub unit yaitu sub unit 1.42 yang berbunyi sebagai berikut:

1.42 Satuan Biaya Insentif Upaya Kesehatan Masyarakat/UKM (Dana BOK)

Insentif Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) diberikan kepada UPT. Puskesmas sebagai kompensasi atas kesediaannya untuk melakukan kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang melaksanakan kegiatan program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) untuk meningkatkan kinerja program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) di puskesmas. Insentif Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) diberikan setiap bulan, setelah puskesmas melaporkan kinerja dan penyerapan dana BOK bulan yang bersangkutan dengan besaran sebagaimana tabel 1.42. berikut:

Tabel 1.42. Satuan Biaya Insentif Upaya Kesehatan Masyarakat/UKM (Dana BOK)

| NO. | URAIAN | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----|----------------------|-----------------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Insentif UKM ASN | Puskesmas/Bulan | 5.150.000,00 |
| 2. | Insentif UKM Non-ASN | Puskesmas/Bulan | 2.250.000,00 |

6. Dalam ketentuan Sub Unit 9.1. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Harian, catatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Catatan:

- a. pemberian BBM harian untuk kendaraan dinas operasional di dalam kota diberikan setiap awal bulan secara keseluruhan dalam bentuk uang atau kupon pada bulan berjalan yang besarnya didasarkan dari perkalian jumlah hari masuk kerja efektif pegawai bersangkutan dengan besaran pemberian BBM per hari dan harga BBM yang berlaku;
- b. BBM sebagaimana dalam huruf a tidak berkurang pada saat pegawai yang bersangkutan sedang melakukan perjalanan dinas;
- c. kendaraan non dinas yang ditetapkan oleh pengguna anggaran sebagai kendaraan operasional diperuntukkan hanya untuk kegiatan yang bersifat insidental, dengan pemberian bahan bakar minyak (BBM) sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan tidak terus menerus;
- d. pemberian BBM untuk kendaraan pemadam kebakaran, per kejadian pemadaman kebakaran dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya BBM harian sebagaimana tercantum dalam tabel 10.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara at cost).

WALIKOTA PASURUAN,

SAIFULLAH YUSUF